

KEPEMIMPINAN IDEAL DALAM AL-QUR'AN (PANDANGAN M. QURAIISH SHIHAB DALAM *TAFSÎR AL-MISHBÂH*)

M. Al-Zurzani G. Abdullah¹, Abd Muid Nawawi², Nurbaiti³
^{1,2,3}Universitas PTIQ Jakarta, Jl. Lebak Bulus Raya No.2, Jakarta, Indonesia
Email: malzurzani95@gmail.com

Article History

Received: 09-12-2024

Revision: 20-12-2024

Accepted: 23-12-2024

Published: 25-12-2024

Abstract. This study aims to analyze the concept of ideal leadership in the Qur'an according to the view of M. Quraish Shihab. According to him, ideal leadership reflects the characteristics of the Prophet Muhammad (saw), which is identified by experts through the search of the Qur'an and Hadith. These characteristics include *shiddîq* (honest), *amânah* (trusted), *tablîgh* (delivering treatises), and *fathânah* (giving instructions). The research method used is a qualitative approach and a library research approach. Data collection is carried out through verses of the Qur'an using thematic (*Maudhû'i*), in other words the author tries to find the answer to the Qur'an by collecting verses of the Qur'an which has one goal, namely about ideal leadership. The results of the analysis show that the ideal leadership must have a character like the Prophet Muhammad (PBUH).

Keywords: Leadership, Ideal, The Quran

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kepemimpinan ideal dalam Al-Qur'an menurut pandangan M. Quraish Shihab. Menurutnya, kepemimpinan ideal mencerminkan karakteristik Nabi Muhammad Saw, yang diidentifikasi oleh para ahli melalui penelusuran Al-Qur'an dan Hadis. Karakteristik tersebut meliputi sifat *shiddîq* (jujur), *amânah* (terpercaya), *tablîgh* (menyampaikan risalah), dan *fathânah* (pemberi petunjuk). Metode penelitian yang di gunakan dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan studi kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan melalui ayat-ayat Al-Qur'an menggunakan tematik (*Maudhû'i*), dengan kata lain penulis berusaha mencari jawaban Al-Qur'an dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai tujuan yang satu yaitu tentang kepemimpinan ideal. Hasil analisis menunjukkan bahwa kepemimpinan yang ideal itu harus memiliki karakter seperti Nabi Muhammad Saw. Selain itu M. Quraish Shihab berpendapat bahwa seorang pemimpin berhak untuk ditaati, berhak untuk mendapat penghargaan yang layak, dan berhak untuk mengelola bumi.

Kata Kunci: Kepemimpinan, Ideal, Al-Quran

How To Cite: Al-Zurzani, G., M. Nawawi, A. M., & Nurbaiti. (2024). Kepemimpinan Ideal dalam Al-Qur'an (Pandangan M. Quraish Shihab dalam *Tafsîr Al-Mishbâh*). *Indo-Mathedu Intellectuals Journal*, 5 (6), 8227-8244. <http://doi.org/10.54373/imeij.v5i6.2325>

PENDAHULUAN

Al-Qur'an menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk Allah SWT memiliki tugas untuk memakmurkan bumi. Tugas ini dalam bahasa Al-Qur'an dikenal dengan istilah pemimpin (*khalîfah*) (Abdallah et al., 2019). Sebagai *khalîfatu fi al-ardh*, setiap individu setidaknya menjadi pemimpin bagi diri sendiri yang harus senantiasa mengaktualisasikan amal kebajikan bagi dirinya, orang lain (masyarakat) dan lingkungan sekitarnya guna mencapai

kesejahteraan dunia dan akhirat (Muthi'ah, 2017). Manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi memiliki tugas menggali potensi kepemimpinannya untuk memberikan pelayanan dan pengabdian yang diniatkan semata-mata karena amanah Allah, yaitu dengan cara memainkan perannya sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta (*rahmatan li al-'âlamîn*) (Sarnoto & Rahmawati, 2022). Hal ini senada dengan pesan bahwa Nabi Nabi Muhammad Saw diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia (Sarnoto, 2023a). Kepemimpinan dalam Al-Qur'an merupakan amanah yang akan dimintai pertanggung jawaban tidak hanya kepada orang yang dipimpin namun juga dihadapan Allah SWT kelak di hari akhir (Muhadi & Mustaqim, 2005). Pemimpin memiliki dua dimensi tanggung jawab yang secara sekaligus harus dilaksanakan dengan baik, yaitu *hablun min Allah* (hubungan vertikal) dan *hablun min an-nas* (hubungan horizontal) leaderl.

Kepemimpinan Ideal telah dicontohkan dengan sangat sempurna oleh Nabi Nabi Muhammad Saw. Dengan integritasnya yang luar biasa dan mendapatkan gelar sebagai *al-Amîn* (terpercaya), Nabi Muhammad Saw. mampu mengembangkan kepemimpinan yang paling ideal dan paling sukses dalam sejarah peradaban umat manusia. Sifat-sifatnya yang utama yaitu *shiddîq* (*integrity*), *amânah* (*trust*), *fathânah* (*smart*) dan *tablîgh* (*openly*) mampu mempengaruhi orang lain dengan cara mengilhami tanpa mengindoktrinasi, menyadarkan tanpa menyakiti, membangkitkan tanpa memaksa dan mengajak tanpa memerintah (Rafsanjani, 2017). Nabi Muhammad Saw merupakan pemimpin agama dan negara yang ideal. Beliau mengemban dua tugas tersebut sekaligus. Di satu sisi sebagai Nabi dan Rasul Allah yang menyampaikan dakwah Islam, di sisi lain sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di negara Madinah ketika itu. Sepeninggal Nabi, muncul persoalan politik (*siyâsah*) terutama yang berkenaan dengan estafet kepemimpinan, dan pada gilirannya timbul perbedaan pendapat di kalangan sahabat tentang siapa yang paling berhak menggantikan kedudukan Nabi sebagai pemimpin dalam menjalankan roda pemerintahan setelah wafatnya (Hassan, 1964).

Meskipun masalah kepemimpinan tersebut berhasil diselesaikan dengan diangkatnya Abu Bakar al-Siddiq (w. 23 H/634 M) sebagai *khalîfah*, namun dalam waktu tidak lebih dari tiga dekade, persoalan serupa muncul kembali dalam lingkungan umat Islam. Kalau yang pertama antara kaum Muhajirin dan kaum Ansar, maka yang terakhir adalah perselisihan antara Khalifah 'Ali bin Abu Talib (w. 41 H/661 M) dan Mu'awiyah bin Abi Sufyan (w.64 H/680 M) (Hitti, 1997). Terjadinya perselisihan dalam memilih dan menentukan pemimpin di masa *khulafâ' al-râsyidûn* berlangsung terus sampai masa dinasti-dinasti Islam, disebabkan adanya perbedaan konsepsi dalam memahami kriteria pemimpin yang disinggung oleh Al-Qur'an.

Kepemimpinan adalah permasalahan terpenting yang menjadi pembahasan dan dialog, setelah wafatnya pemimpin besar umat Islam yaitu Nabi Muhammad Saw. Tidak ada satupun dari ajaran-ajaran agama, yang menjadi pembahasan dan konflik dalam sepanjang waktu seperti pembahasan kepemimpinan (Subhani, 1997). Dilihat dari berbagai sudut pandang, kepemimpinan umat Islam setelah Nabi SAW disebut dengan beberapa nama, diantaranya adalah “*imâmah*” (kepemimpinan) dan “*khilâfah*” (kekhilafahan). Jabatan ini dikatakan *imâmah* karena memiliki sisi kepemimpinan dan dikatakan *khilâfah* karena sebagai pengganti Nabi Muhammad Saw. Atas dasar ini, pemimpin dalam syariat Islam adalah *khilâfah* dan pengganti Nabi Muhammad Saw.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan, yang merupakan salah satu pendekatan penelitian kualitatif di mana lokasi atau tempat penelitiannya berfokus pada studi pustaka, dokumen, arsip, dan sumber-sumber serupa (Zed, 2008). Dengan pendekatan ini, peneliti mengumpulkan berbagai literatur yang relevan untuk mendalami topik penelitiannya. Sumber data merupakan subjek di mana informasi diperoleh dalam penelitian (Sarnoto, 2023c). Sumber data dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu:

- Sumber data primer: sumber data primer meliputi buku-buku yang secara langsung terkait dengan objek penelitian. Penulis akan mengkaji data primer seperti buku *Tafsîr Al-Mishbâh* dan karya-karya M. Quraish Shihab lainnya, termasuk "Al-Maidah 51: Satu Firman Beragam Penafsiran", "Islam dan Kebangsaan", "*Khilafah: Peran Manusia di Bumi*", "*Wasathiyyah*", serta karya lain yang relevan dengan tema kepemimpinan.
- Sumber data sekunder: sumber data sekunder meliputi buku-buku yang tidak secara langsung terkait dengan objek material dan formal penelitian, namun memiliki relevansi yang penting. Sumber data ini mencakup buku-buku seperti "*Fî Dzîlal Al-Qur'an*" karya Sayyid Qutb, "*Tafsîr al-Mîzân*" karya Muhammad Husain al-Thabathaba'i, "*Tafsîr Asmâ' al-Husna*" karya al-Zajjaj, "*Tafsîr Al-Qur'an al-'Adzim*" karya Ibnu Katsir, "*Tafsîr Jalailain*" karya Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin al-Suyuthi, "*Tafsîr al-Kabir*" karya Fakhr al-din ar-Razi, "*al-Kashaf*" karya al-Zamakshari, "*Nahwa Tafsîr al-Maudhui*" karya Muhammad al-Ghazali, "*al-Dur al-Manshur*" karya al-Suyuthi, "*al-Tahrir wa al-Tanwir*" karya Muhammad Tharir Ibnu Asyur, serta beberapa buku lain yang relevan dengan topik pembahasan ini.

HASIL DAN DISKUSI

Menurut M. Quraish Shihab, berbicara tentang pemimpin berarti berbicara tentang manusia dan potensi mereka. Seorang pemimpin harus selalu tampil baik, sehingga mereka harus mengembangkan semua kemampuan mereka. Memiliki pemimpin yang tidak berpotensi sama dengan memiliki anak yang cacat, dan seperti kata pepatah, “Air cucuran atap jatuh ke pelimbanan juga,” mereka pasti tidak akan mampu hidup dengan baik, terutama dalam hal memimpin (Shihab, 2011).

Kriteria Pemimpinan Negara yang Ideal” dalam *Tafsîr Al-Mishbâh* berdasarkantiga term utama yaitu *Khalîfah*, *Qawwâm*, dan *Ulû al-amr*, penulis akan menganalisis “Kriteria Pemimpinan Negara yang Ideal” dengan menambahkan ayat lain yang memiliki keterkaitan dengan hal tersebut di antaranya: Q.S. an-Nûr/24: 55 tentang keimanan dan ketakwaan pemimpin, Q.S. Âli ‘Imrân/3: 28, Q.S. an-Nisâ/4: 144, al-Mâ’idah/5: 51, dan al-Mumtahanah/60: 1 dan 13 tentang memilih pemimpin yang beriman, Q.S. al-Qashash/28: 26, Q.S. al-Bâqarah/2: 247 tentang yang kuat dan dapat dipercaya seorang pemimpin, Q.S. Shâd/38: 26, Q.S. an-Nisâ’/4: 58, 105, dan 135, an-Nahl/16: 90, dan al-Mâ’idah/5: 6 tentang pemimpin yang adil dan professional, Q.S. Âli ‘Imrân/3: 159 pemimpin yang lemah lembut, Q.S. al-Mâ’idah/5: 54 pemimpin yang berani dan tegas, Q.S. Âli-‘Imrân/3: 159 pemimpin yang bermusyawarah, Q.S. An-Nisâ’: 59 Pemimpin yang mengikuti hukum Allah, Q.S. an-Nisâ’/4: 58, dan Q.S. Shâd/38: 26 Pemimpin yang amanah.

Beriman dan Bertakwa

Seorang pemimpin secara umum harus memiliki iman dan takwa, karena dengan iman dan takwa, pemimpin dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selalu didasarkan pada nilai-nilai iman dan takwa. Dengan demikian, diharapkan bahwa pemimpin tersebut akan mendapat bimbingan dan petunjuk dari Allah untuk menghadapi segala kesulitan yang dihadapinya. Pemimpin juga menyadari bahwa segala perbuatannya akan dimintai pertanggungjawaban di dunia, dan terutama di akhirat akan mendapatkan ganjaran sesuai dengan amalannya, baik itu pahala yang baik untuk amal baiknya, maupun siksaan yang sesuai untuk amal buruknya. Dalam sebuah hadis Nabi, disebutkan: “Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya.” Oleh karena itu, seorang pemimpin bertanggung jawab terhadap orang-orang yang dipimpinnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas tugas kepemimpinannya (Imam Hafiz Abu Husen Muslim, 2005). Dalam konteks pemilihan pemimpin secara umum, terutama yang dipilih oleh orang-orang yang beriman, Allah memberikan pedoman dalam QS. Âli

‘Imrân/3:28 mengenai kriteria pemimpin yang harus dipilih dari kalangan orang yang beriman dan bertakwa.

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَةً
وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ الْمَصِيرُ

Terjemahan:

Janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barang siapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apa pun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-Nya, dan hanya kepada Allah tempat kembali. (Q.S. Âli ‘Imrân/3: 28)

Interpretasi dari ayat ini menunjukkan bahwa orang-orang beriman (muslim) dilarang menjadikan orang kafir (yang tidak beriman dan bertakwa) sebagai pemimpin. Karena itu, hal ini akan merugikan mereka sendiri dalam hal agama dan kepentingan umat. Ini terutama terjadi jika kepentingan orang kafir lebih penting daripada kepentingan kaum muslim, sehingga kekafiran menyebar dan memperkuat posisi orang-orang kafir. Oleh karena itu, Allah melarang orang Islam untuk memilih orang yang tidak beragama Islam sebagai pemimpin mereka. Jika pemimpin secara umum dilarang oleh Allah diangkat dari orang kafir, hal itu bahkan lebih dilarang oleh Allah ketika seorang pemimpin negara diangkat sebagai pemimpin tertinggi negara, yang bertanggung jawab atas semua urusan negara dan penduduknya. Larangan itu dibuat untuk menjaga kemaslahatan agama dan mencegah kaum muslim terganggu dalam usaha mereka untuk mencapai tujuan agama mereka.

Pemerintahan Islam tidak boleh mengadakan perjanjian persahabatan dengan pemerintahan yang tidak beragama Islam jika tujuan mereka adalah untuk mencegah kemudaratan atau mendapatkan keuntungan. Kemampuannya untuk bersahabat ini tidak terbatas pada situasi yang sulit; itu dapat terjadi kapan saja, sesuai dengan *qâ'idah fiqhiyah*: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan.”

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa, berdasarkan tafsir Q.S. Âli ‘Imrân/3: 28, orang-orang mukmin dilarang menjadikan orang-orang kafir sebagai penolong atau pemimpin mereka. Ini karena jika seorang mukmin menjadikan mereka sebagai penolong atau pemimpin, itu berarti orang-orang beriman dalam keadaan lemah. Itu adalah akibat yang paling sedikit. Jangan menjadikan mereka sebagai pemimpin atau penolong kecuali ada manfaat bagi kaum muslim atau paling tidak ada kerugian yang dapat terjadi darinya. Didasarkan pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hukumnya haram bagi kaum muslim untuk menunjuk orang kafir sebagai pemimpin negara mereka sendiri. Orang yang menjabat sebagai pemimpin negara harus beriman dan bertakwa. Dalam ayat tersebut, yang dimaksud dengan “kufur” adalah

semua tindakan yang bertentangan dengan tujuan agama. Meskipun ayat itu dimaksudkan untuk melarang orang-orang beriman menjadikan orang Yahudi atau Nasrani sebagai orang yang memiliki otoritas untuk menangani masalah orang beriman, larangan itu juga mencakup orang yang dinamai muslim yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan tujuan ajaran Islam (Shihab, 2011).

Sehat Fisik dan Mental, Jujur, dan Memiliki Kemampuan

Sehat secara fisik dan mental, jujur, dan memiliki kemampuan adalah hal yang penting bagi seorang pemimpin negara. Kesehatan jasmani dan rohani yang baik, integritas (dapat dipercaya), dan keberanian adalah atribut yang diperlukan. Selain itu, pemimpin juga harus memiliki kapasitas intelektual dan pengetahuan yang luas. Syarat-syarat ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. al-Qashash/28: 26 berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Terjemahan: Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S. al-Qashash/28: 26).

Kalimat *al-Qawiyy al-Amîn* dimaksudkan bahwa orang yang paling cocok untuk diberi tanggung jawab adalah orang yang kuat dan dapat dipercaya. Menurut M. Quraish Shihab, kekuatan yang dimaksud di sini mencakup kemampuan yang luas dalam berbagai aspek. Oleh karena itu, prioritas utama adalah mempertimbangkan keahlian yang sesuai dengan tugas yang akan diberikan kepada individu yang dipilih. Selain itu, kepercayaan yang dimaksud mengacu pada integritas pribadi, yang mengharuskan individu tersebut memiliki sifat amanah. Ini berarti bahwa orang yang dipilih tidak menganggap apa yang dipegangnya sebagai milik pribadi, melainkan sebagai amanah yang diberikan, yang harus dijaga dengan baik. Ketika diminta mengembalikan amanah tersebut, ia harus siap untuk melakukannya tanpa ragu atau penundaan (Shihab, 2011). Dalam Q.S. al-Bâqarah/2: 247, seorang pemimpin untuk umat harus dapat memimpin dengan adil dan bijaksana, serta memiliki kualitas yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan umat secara efektif.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلَكًا ۖ قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ ۗ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ ۗ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Dan Nabi mereka berkata kepada mereka, “Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi rajamu.” Mereka menjawab, “Bagaimana Talut memperoleh kerajaan atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya, dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?” (Nabi) menjawab, “Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kelebihan ilmu dan fisik.” Allah memberikan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui. (Q.S. al-Bâqarah/2: 247)

Dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah memilih Thalut menjadi raja karena Allah telah menganugerahkan kepadanya ilmu yang luas dan tubuh yang kuat (perkasa), sehingga ia mampu memimpin Bani Israil. Dari ayat ini dapat diambil pengertian bahwa seorang yang akan memimpin negara itu hendaklah (1) mempunyai kekuatan fisik, memiliki kesehatan jasmani dan rohani, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pemimpin negara, (2) menguasai ilmu pengetahuan yang luas, mengetahui letak kekuatan rakyat dan kelemahannya, sehingga dapat memimpin dengan penuh bijaksana, dan (3) bertakwa kepada Allah agar mendapat taufik dan hidayah-Nya untuk mengatasi segala kesulitan yang tidak mungkin diatasinya sendiri, kecuali dengan taufik dan hidayah-Nya (Agama, 2012).

Berdasarkan dua ayat Al-Qur'an dan penafsirannya yang telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa: pertama, syarat kesehatan fisik yang harus dimiliki oleh seorang calon pemimpin adalah keutuhan anggota tubuhnya, tanpa cacat seperti kehilangan tangan atau kaki, kebutaan, tuli, bisu, atau gangguan fisik lainnya yang dapat menghambatnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai pemimpin. Selain itu, calon pemimpin diharapkan memiliki kemampuan pendengaran, penglihatan, dan berbicara yang baik agar dapat berkomunikasi efektif dalam proses pengambilan keputusan dan penegakan hukum. Kondisi fisik yang prima dan sehat juga diperlukan untuk memastikan bahwa ia dapat bergerak dengan leluasa dan menjalankan tugas serta tanggung jawabnya dengan baik. Kesehatan mental yang diperlukan oleh calon pemimpin mencakup ketidakhadiran kelainan mental seperti ketakutan, gangguan mental, atau kondisi psikologis lain yang dapat mengganggu pelaksanaan tugasnya. Untuk menentukan kesehatan mental seseorang, pemeriksaan oleh dokter spesialis yang kompeten diperlukan. Dengan memiliki integritas fisik dan kesehatan mental yang baik, seorang pemimpin diharapkan mampu secara optimal, baik dari segi jasmani maupun rohani, dalam melaksanakan tugasnya dengan baik (Pulungan, 1994).

Pelaksanaan tugasnya sebagaimana disyaratkan dalam QS. al-Qashash/28: 26 di atas, seorang pemimpin harus jujur dan dapat dipercaya. Ia harus memelihara amanah yang diberikan kepadanya, bertanggung jawab sepenuhnya, dan berusaha dengan segenap kemampuannya untuk menjalankan semua tugas dan kewajibannya dengan baik. Selain itu, ia

harus mengelola dengan cermat seluruh harta kekayaan negara yang dipercayakan kepadanya oleh rakyat dan dari sumber-sumber lainnya, sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Hal ini bertujuan agar tidak terjerumus dalam korupsi atau memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok tertentu. Pemimpin harus senantiasa jujur, menolak suap, dan tidak terlibat dalam kolusi dengan para pembantunya, termasuk para menteri, untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu

Kemampuan ilmiah yang harus dimiliki oleh pemimpin, menurut al-Baghdadi, penting bagi pemimpin untuk memahami ilmu tentang halal dan haram. al-Gazali tidak mengharuskan pemimpin untuk menjadi mujtahid, karena dalam masalah agama tertentu yang tidak dikuasainya, ia dapat berkonsultasi dengan ulama yang ahli pada zamannya (Al-Gazali, 1994). Kemampuan ilmiah yang diperlukan oleh calon pemimpin meliputi ilmu politik, tata negara, ekonomi, dan bidang lainnya yang merupakan cabang ilmu umum. Semua ini penting untuk mendukung kelancaran pemimpin dalam menjalankan tugas pemerintahan, meskipun ia dibantu oleh menteri-menteri yang ahli dalam bidang masing-masing (Sarnoto & Sholihin, 2017). Dengan demikian, pemimpin diharapkan memiliki kemampuan untuk merumuskan kebijakan, memiliki wawasan yang luas, serta pengetahuan yang memadai untuk mengelola kehidupan rakyat dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Penguasaan pengetahuan yang luas sangat penting untuk mendukung kemampuan pemimpin dalam pengambilan keputusan yang independen setiap saat. Kekurangan pengetahuan dan wawasan yang memadai dapat menyebabkan pemimpin mengabaikan nilai-nilai keagamaan dalam tata kelola pemerintahannya, yang pada akhirnya dapat mengakibatkan penanganan masalah-masalah negara dengan kurang cermat dan serampangan.

Adil dan Professional

Seorang calon pemimpin harus menjadi individu yang adil dan profesional. Kata "adil" merupakan kata serapan dari bahasa Arab dalam bentuk masdhar yaitu *'adl* yang berarti lurus atau sama. Dari makna ini, kata *'adl* mengandung arti menetapkan hukum dengan benar. Seorang yang *'adl* bertindak secara patut dan tidak sewenang-wenang (Fachruddin, 1992). Dalam Al-Qur'an, kata "*'adl*" memiliki beragam aspek dan objek, sebagaimana diuraikan oleh Shihab. Setidaknya ada empat makna *'adl* (keadilan):

- *'adl* yang berarti "sama". Pengertian ini paling umum terdapat dalam Al-Qur'an.
- *'adl* yang berarti "seimbang". Keadilan dalam konteks ini menunjukkan bahwa Allah yang Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui menciptakan dan mengatur segala sesuatu dengan ukuran, kadar, dan waktu yang tepat.

- ‘*adl* yang berarti "memperhatikan hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknyanya". Definisi ini mengacu pada menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan hak seseorang dengan cara yang adil. Lawannya adalah kezaliman, yaitu pelanggaran terhadap hak-hak individu.
- ‘*adl* yang berarti "dinisbahkan kepada Allah". ‘*Adl* dalam konteks ini menunjukkan memelihara kewajiban atas kelangsungan eksistensi.

Keadilan Allah pada dasarnya adalah rahmat dan kebaikan-Nya. Keadilan Allah memastikan bahwa rahmat-Nya tersedia bagi setiap makhluk sejauh mereka dapat meraihnya. Allah memiliki hak mutlak atas segala yang ada, sementara makhluk ciptaan-Nya tidak memiliki sesuatu yang dapat menambah nilai atau memberi manfaat kepada-Nya (Islam, 1994). M. Quraish Shihab menegaskan bahwa seseorang yang berupaya mencontoh sifat 'adl Allah, setelah diyakini keadilan-Nya, harus mengutamakan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk terhadap keluarga, orang tua, dirinya sendiri, dan bahkan terhadap musuhnya. Hal pertama yang harus ditegakkan dalam menjalankan keadilan adalah terhadap diri sendiri, dengan mengendalikan hawa nafsu dan emosi agar patuh terhadap logika dan ajaran agama (Shihab, 2007). Selanjutnya, terkait dengan 'adl yang telah dijelaskan dalam berbagai konteks di atas, yang merupakan syarat utama yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, Allah menyatakan dalam Q.S. Shâd/38: 26:

يٰۤاٰدٰدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِى الْاَرْضِ فَاَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌۢۙ اِيْمًا نَسُوْا يَوْمَ الْحِسَابِ

Terjemahan:

(Allah berfirman), “Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Shâd/38: 26)

Allah menggambarkan pengangkatan Nabi Daud sebagai pemimpin dan hakim di tengah-tengah masyarakatnya. Allah memerintahkan Nabi Daud untuk memutuskan perkara-perkara yang timbul di antara manusia dengan keadilan, berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Dalam wahyu tersebut terdapat hukum-hukum yang mengatur kehidupan sejahtera manusia di dunia dan kebahagiaan mereka di akhirat. Oleh karena itu, Allah melarang Nabi Daud untuk mengikuti hawa nafsunya dalam menangani segala urusan yang berkaitan dengan kesejahteraan dan kebahagiaan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Ayat ini memberikan isyarat bahwa pengangkatan Nabi Daud sebagai Rasul dan tugas-tugasnya sebagai

Rasul memberikan pelajaran bagi pemimpin-pemimpin setelahnya dalam melaksanakan kepemimpinan mereka (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2011).

Pemimpin negara yang adil adalah pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi. Menurut al-Jurjani, ciri-ciri pemimpin negara yang adil termasuk memiliki integritas moral yang kuat, menjauhi dosa-dosa besar dan tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, selalu memihak kepada kebenaran, dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang rendah. (Al-Jurjani, 1987) al-Mawardi juga sependapat bahwa pemimpin negara yang adil adalah pemimpin yang selalu berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak ragu-ragu, mampu mengendalikan emosi baik dalam keadaan senang maupun marah, serta selalu menunjukkan sikap yang baik dalam hal agama dan dunia (Al-Mawardi, 1960).

Hampir sejalan dengan pandangan al-Mawardi, al-Ghazali mengemukakan bahwa pemimpin negara yang adil adalah mereka yang memelihara kepentingan rakyatnya, tidak memodifikasi hukuman yang seharusnya diberikan kepada pelaku kejahatan, konsisten dalam menegakkan kebenaran, memiliki rasa malu dan kemurahan hati, berani untuk menegur bawahannya yang bertindak zalim, tidak sombong dan pemaarah. Pemimpin tersebut tidak akan merasa nyaman hidup dalam kemewahan sementara rakyatnya menderita, hidup sederhana tanpa pamer kemewahan, berusaha untuk memenangkan hati rakyat dengan cara-cara yang diperbolehkan dalam agama, serta menghindari segala sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama dan mengundang murka Allah. Ia akan menindak tegas siapa pun di antara rakyatnya yang melanggar hukum, meskipun tindakannya ini berpotensi membuatnya tidak disenangi dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang menentang ketegasannya (Al-Gazali, 1998).

Bagi al-Mawardi, sifat adil dari seorang pemimpin negara merupakan fondasi utama. Karena pentingnya sifat adil ini, Ibnu Taimiyah bahkan berpendapat bahwa pemerintahan yang adil, meskipun dipimpin oleh seorang yang kafir, lebih baik daripada pemerintahan muslim yang zalim (Taimiyah, n.d.-a). Tanpa syarat adil ini, proses yang baik dalam kepemimpinan negara sulit terwujud. Lebih lanjut, sifat adil ini mencerminkan dirinya terlebih dahulu pada tingkat individual dengan sikap sukarela melakukan perbuatan baik dan enggan melakukan perbuatan buruk. Apabila keadilan ini sudah terinternalisasi pada tingkat personal, maka kemungkinan besar ia mampu menegakkan keadilan secara sosial dan masyarakat. Ia mampu mengatasi berbagai kelompok masyarakat atas prinsip kesetaraan. Sebagai contoh, Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengumpulkan sebagian harta kekayaan dari gubernur yang memerintah di daerah yang makmur, lalu membagikannya secara merata kepada pejabat yang memerintah di daerah yang miskin (Taimiyah, 2020).

Pendapat Ibnu Taimiyah yang senada dengan pendapat Shihab (2024) yang menyatakan bahwa pemerintahan yang adil, meskipun dipimpin oleh orang kafir, lebih baik daripada pemerintahan muslim yang zalim. Hal ini walaupun pandangan tersebut bertentangan dengan larangan Allah dalam mengangkat pemimpin dari kalangan yang kafir (Al-Imran/3:28). Begitu juga, keadilan yang dimiliki oleh orang kafir tersebut bersifat relatif, karena ia mungkin juga akan berperilaku sebaliknya, tidak mempertimbangkan perspektif Islam dan akhirnya merugikan umat Muslim.

Konsep keadilan dalam konteks sosial-kemasyarakatan, khususnya dalam peran seorang pemimpin negara. Keadilan bagi seorang pemimpin negara tidak hanya berarti keserasian atau keseimbangan dalam mengurus kesejahteraan dan kebahagiaan warga negara, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil dan seimbang dalam dimensi keadilan. Keadilan dipandang sebagai prinsip penting yang menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia. Ketika keadilan ditegakkan dengan baik, maka tatanan kehidupan dunia dapat terjaga dan terpelihara. Namun, jika keadilan terancam atau tidak lagi ditegakkan, maka keseimbangan dalam tatanan kehidupan dunia akan terganggu.

Pentingnya keadilan ini tercermin dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti yang terdapat dalam Q.S. an-Nisâ'/4: 58, 105, dan 135, an-Nahl/16: 90, dan al-Mâ'idah/5: 6, yang menyerukan manusia untuk menegakkan keadilan. Konsep keadilan ini juga erat kaitannya dengan prinsip persamaan di antara manusia dalam Islam, yang tidak membedakan berdasarkan warna kulit, suku bangsa, bahasa, atau ras, melainkan berdasarkan ketakwaan seseorang kepada Allah. Hal ini tercermin dalam ayat Al-Qur'an dalam Q.S. al-Hujurât/49: 13.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan: Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti. (Q.S. al-Hujurât/49: 13)

Interpretasi dari ayat tersebut adalah setiap individu tidak boleh mendapat perlakuan istimewa di mata hukum. Nabi Muhammad mengajarkan bahwa keruntuhan sebuah masyarakat sering dimulai dari ketidakadilan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Mereka menghukum rakyat biasa yang bersalah, sementara membiarkan para bangSAWan atau elit yang melanggar hukum bebas dari hukuman (Iqbal, 2001). Untuk memastikan adilnya seorang pemimpin negara, pemilihan pemimpin harus didasarkan pada profesionalisme. Pemimpin

negara tidak boleh memilih pejabat berdasarkan hubungan primordial atau kekerabatan semata. Profesionalisme dan integritas harus menjadi pertimbangan utama dalam mengangkat pejabat negara. Kisah Nabi Musa dalam Q.S. al-Qashash/28: 26 mengisyaratkan bahwa orang yang dipilih sebagai pejabat harus memiliki dua kualifikasi utama: keahlian dalam bidangnya dan integritas untuk menjaga amanah.

Allah SWT, yang Maha Adil, memerintahkan umat manusia untuk bertindak adil baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Keadilan adalah landasan yang sangat penting dalam interaksi sosial. Dengan keadilan, masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Sebaliknya, pelanggaran terhadap keadilan oleh seorang pemimpin dapat merusak tatanan sosial. Meskipun pelanggaran itu mungkin memberikan keuntungan sesaat, akibatnya adalah kehancuran masyarakat secara keseluruhan, termasuk pemimpin tersebut sendiri. Keadilan juga memiliki hubungan erat dengan kebenaran, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. Shâd/38: 26.

... فَأَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ...

Terjemahan:

... berilah keputusan diantara manusia dengan adil

Ayat di atas menggunakan kata Al-Haqqu ketika akan menyuruh berbuat adil. Hal ini menjadi bukti bahwa adil merupakan kebenaran yang harus dan terus ditegakkan. M. Quraish Shihab dalam penafsirannya terhadap ayat tersebut mengungkapkan pentingnya para pemimpin untuk memutuskan setiap permasalahan di antara manusia dengan adil. Mereka dilarang untuk mengikuti hawa nafsu, yang bisa membuat mereka terburu-buru dalam mengambil keputusan sebelum mendengarkan semua pihak terkait, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Daud dalam kasus gugatan terhadap kedua belah pihak terkait kambing. Nafsu dapat mempengaruhi keputusan pemimpin, baik itu berasal dari dirinya sendiri atau dari tekanan pihak lain, dan hal ini dapat menyebabkan mereka tersesat dari jalan yang ditetapkan Allah. Mereka yang tersesat dari jalan Allah hingga akhir hayatnya akan menghadapi azab berat sebagai konsekuensi dari kesalahan mereka, yang muncul karena lupa akan adanya akhirat (Shihab, 2011).

Lemah Lembut

Dengan memiliki kelembutan hati, seorang pemimpin akan lebih sensitif terhadap situasi di sekitarnya. Kemampuannya untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain membuatnya dicintai oleh rakyatnya. Sebaliknya, jika seorang pemimpin bersikap keras dan kasar, orang-

orang di sekitarnya cenderung menjauhinya. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Allah SWT dalam Al-Qur'an:

... وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ...

Terjemahan:

Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. (Q.S. Âli 'Imrân/3: 159)

Ayat tersebut menggambarkan dualitas antara sisi eksternal dan internal manusia, di mana perilaku keras mencerminkan sisi eksternal, sementara kekerasan batin menunjukkan sisi internalnya. Nabi Nabi Muhammad Saw menolak kedua hal tersebut secara bersamaan, menegaskan bahwa seseorang dapat memiliki perilaku keras tetapi hati yang lembut, atau sebaliknya memiliki hati yang lembut namun kurang berpengetahuan tentang etika. Yang terbaik adalah menggabungkan keindahan eksternal dan internal, dengan perilaku yang sopan, kata-kata yang indah, dan jiwa yang mulia serta penuh kasih sayang.

Seorang pemimpin yang berhati lembut diharapkan mampu menerima masukan dan pendapat dari orang lain. Berbicara dengan kata-kata yang baik dan lembut akan membuat orang merasa nyaman dan memungkinkan komunikasi yang efektif tanpa memandang status sosial. Ketika pemimpin berbicara dengan lemah lembut, ia akan dihormati tidak hanya oleh bawahannya tetapi juga oleh masyarakat secara luas. Kepribadian yang berhati lembut merupakan salah satu kunci efektivitas kepemimpinan (Shihab, 2011).

Berani dan Tegas

Seorang pemimpin negara harus memiliki keberanian untuk menjaga dan mempertahankan wilayah kekuasaannya dari serangan musuh. Dia juga harus berani untuk menegur bawahannya yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan, serta berani bertindak tegas terhadap siapa pun di antara rakyatnya yang melanggar hukum. Meskipun tindakan ini dapat membuatnya dibenci dan dimusuhi oleh pihak-pihak yang menentang tindakan tegas, hal ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Allah SWT telah menegaskan dalam Al-Qur'an Q.S. al-Mâ'idah/5: mengenai pentingnya keberanian dan ketegasan dalam menjalankan keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahan:

Wahai orang-orang yang beriman! Barangsiapa di antara kamu yang murtad (keluar) dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum, Dia mencintainya mereka dan mereka pun mencintainya-Nya, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman,

tetapi bersikap keras terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah, dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui. (Q.S. al-Mâ'idah/5: 54)

M. Quraish Shihab berpendapat, sikap tegas terhadap orang-orang kafir sebagaimana disebutkan dalam ayat tersebut tidak bermakna untuk memusuhi mereka secara pribadi, memaksa mereka untuk memeluk Islam, atau merusak tempat ibadah mereka, atau menghalangi mereka dalam menjalankan keyakinan dan ajaran agama mereka. Yang dimaksudkan adalah bersikap tegas terhadap permusuhan mereka, atau upaya-upaya mereka yang menghina ajaran Islam dan hak-hak kaum Muslim, terutama jika mereka mencoba merebut hak-hak sah kaum Muslim (Shihab, 2011).

Pemimpin negara yang berani dan tegas tidak gentar menghadapi kritik atau celaan dari pihak mana pun, baik itu berupa kritik langsung, ucapan yang mengecam, atau sikap tidak setuju, baik dari pihak yang mendukung atau yang menentang. Sikap tegas ini bisa berupa respons yang keras atau teguran yang lembut (Sarnoto, 2023b). Dengan demikian, sifat pemimpin negara yang berani dan tegas tidak mepedulikan celaan dari siapa pun, dalam bentuk apapun, yang bisa menghalangi pelaksanaan programnya sesuai dengan nilai-nilai Ilahi. Ia memiliki keberanian untuk menghadapi risiko dan melindungi rakyatnya dari penindasan dan ancaman baik dari dalam maupun luar negeri.

Musyawaharah

Musyawaharah bertujuan agar pemimpin dapat mendengarkan berbagai pendapat dari para anggotanya sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak terkait. Prinsip ini juga menghasilkan rasa kepercayaan dan dukungan yang lebih besar dari anggota terhadap pemimpin mereka. Prinsip musyawarah ditegaskan dalam beberapa surat Al-Qur'an, salah satunya dalam Q.S. Âli-'Imrân/3: 159:

... وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ...

Terjemahan:

...Dan bermusyawaharahlah dengan mereka dalam urusan itu (Q.S. Âli-'Imrân/3: 159)

Menurut penafsiran M. Quraish Shihab, kata "musyawarah" berasal dari akar kata "شور" yang secara harfiah berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Arti ini berkembang sehingga mencakup segala hal yang dapat diambil atau dihilangkan dari orang lain, termasuk berbagai pendapat. Musyawarah juga dapat dimaknai sebagai menyatakan atau mengajukan suatu pandangan. Secara prinsip, kata "musyawarah" hanya digunakan untuk hal-hal yang

positif, sesuai dengan makna dasarnya yang terkandung dalam akar kata tersebut (Shihab, 2011).

Konsisten Pada Hukum Allah SWT.

Seorang pemimpin harus konsisten dalam menerapkan Hukum Allah SWT. sebagai panduan dalam mengambil keputusan agar terhindar dari kesalahan dan penyelewengan. Perintah untuk berpegang pada hukum Allah sudah tegas diungkapkan dalam Al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Taatilah Rasulnya... (Q.S. An-Nisâ': 59).

M. Quraish Shihab dalam penafsirannya menyatakan bahwa penting bagi pemimpin untuk patuh pada perintah Allah yang tercantum dalam Al-Qur'an dan ajaran Nabi Muhammad Saw. baik itu perintah untuk bertindak maupun untuk menahan diri. Saat seorang pemimpin mengikuti hukum Allah, keadilan akan menjadi kenyataan (Shihab, 2011). Oleh karena itu, memiliki keberanian adalah esensial bagi pemimpin, karena ketika keputusan dibuat dengan didorong oleh ketakutan akan manusia, terutama orang yang memiliki pengaruh besar, keadilan menjadi sulit diwujudkan. Takut pada manusia adalah akar dari pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah SWT. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus hanya takut pada Allah dan memiliki keberanian untuk menegakkan perintah dan larangan Allah kepada semua orang, tanpa pandang bulu terhadap status sosial, kekayaan, atau kecilnya (Labib, 2013).

Pemimpin yang mencintai kebenaran adalah mereka yang benar dalam segala hal dan selalu mengajak para pembantunya, keluarganya, dan rakyatnya untuk hidup dengan kebenaran dalam perkataan, perbuatan, niat, dan cara berpikir. Sebagai contoh, jika dalam kampanye ia berjanji untuk memimpin dengan adil dan meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sebagai pemimpin yang cinta kebenaran, ia akan berusaha keras untuk memenuhi janji tersebut setelah terpilih. Pemimpin yang cinta kebenaran selalu mengedepankan bukti nyata daripada janji-janji kosong. Sebelum bertindak, seorang pemimpin yang cinta kebenaran akan memulai dengan niat yang jujur dan itikad yang baik, yaitu untuk membimbing rakyatnya menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat, bukan untuk memaksa orang untuk menghormatinya, mencari popularitas, atau memperkaya diri sendiri dan keluarganya. Setelah memiliki niat yang benar, seorang pemimpin yang cinta kebenaran juga akan berpikir dengan benar, fokus untuk membangun bangsa dan negaranya daripada memanfaatkan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompoknya (Iqbal, 2001).

Amanah

Seorang pemimpin harus menyadari bahwa tanggung jawab kepemimpinannya bukanlah untuk kepentingan pribadi, melainkan merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Allah SWT menjelaskan dalam Al-Qur'an Q.S. Shâd/38: 26 tentang pengangkatan Nabi Daud sebagai pemimpin:

يٰۤاٰدٰمُ اِنَّا جَعَلٰنَاكَ خَلِيفَةً فِى الْاَرْضِ

Terjemahan:

“Wahai Daud, sesungguhnya engkau kami jadikan khalfah (penguasa) di muka bumi.” (Q.S. Shâd/38: 26)

M. Quraish Shihab menafsirkan bahwa pengangkatan Daud sebagai pemimpin berbeda dengan pengangkatan Adam. Allah SWT melibatkan Bani Isra'il dalam pengangkatan Daud sebagai pemimpin, sehingga Daud hanya menjadi khalifah dalam wilayah tertentu dan ditunjuk sebagai pengganti raja-raja, pemimpin-pemimpin, dan Nabi-Nabi Bani Isra'il sebelumnya. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak boleh mengabaikan orang-orang yang berkontribusi dalam pengangkatannya. Sebagai pemimpin, ia bertanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan mereka, memberikan perlindungan, dan memastikan kenyamanan bagi mereka tanpa memihak di antara mereka.

KESIMPULAN

Kesimpulan atas analisa kepemimpinan Ideal dalam Al-Qur'an pandangan M. Quraish Shihab adalah sebagai berikut:

- Karakter pemimpin ideal dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab adalah karakter yang dimiliki Nabi Muhammad Saw. Para pakar setelah menelusuri Al-Qur'an dan Hadis menetapkan karakter yang harus ada pada Nabi Muhammad dan seorang pemimpin yakni *Shiddîq, Amânah, Tablîgh, dan Fathânah*.
- Adapun Kriteria Pemimpin Ideal dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab di antaranya: 1) beriman dan bertakwa 2) sehat jasmani, rohani, jujur, memiliki kemampuan, 3) adil dan profesional, 4) lemah lembut, 5) berani dan tegas, 6) musyawarah, 7) konsisten pada hukum Allah SWT, dan 8) amanah.
- Terakhir, Kewajiban pemimpin ideal dalam Al-Qur'an menurut M. Quraish Shihab di antaranya: menjamin hukum yang adil, menjaga hak asasi warga, melaksanakan amanat undang-undang, mensejahterakan rakyat, melindungi warga negara, memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Sedangkan Hak Pemimpin Ideal dalam Al-Qur'an menurut M.

Quraish Shihab di antaranya: berhak untuk ditaati, berhak untuk mendapat penghargaan yang layak, dan berhak untuk mengelola bumi

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Pascasarjana Universitas PTIQ Jakarta dan teman-teman dosen yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini hingga dapat di terbitkan.

REFERENSI

- Abdallah, A., Çitaku, F., Waldrop, M., Zillioux, D., Preteni Çitaku, L., & Hayat Khan, Y. (2019). A review of Islamic perspectives on leadership. *International Journal of Scientific Research and Management*, 7(11), 574–578. <https://doi.org/10.18535/ijserm/v7i11.sh02>
- Agama, K. (2012). *al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia.
- Al-Gazali. (1994). *Fadhâil al-Bâthiniyyah*. Kairo: Dar al-Qaumiyah.
- Al-Gazali. (1998). *Etika Berkuasa: Nasehat-Nasehat Imam Al-Ghazali*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Al-Jurjani. (1987). *at-Ta'rîfât*. Beirut: Alamul Kutub.
- Al-Mawardi. (1960). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah*. LBeirut-ibanon: Dar Al-Fikr.
- Fachruddin. (1992). *Ensiklopedia Al-Qur'an*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hassan, H. I. (1964). *Târikh al-Islâmî, juz I*. Mesir: Maktabah al-Nahdah.
- Hitti, P. K. (1997). *History of the Arabs*. London: Macmillan Pres Ltd.
- Imam Hafiz Abu Husen Muslim. (2005). *Shahih Muslim. Kitab Kitab Sholat AlMusafirin wa Qashruha, Bab 33 Al-Amru bi Ta'hadi Al-Qur'an, jilid 1*. Riyadh: Dar Thayyibah.
- Iqbal, M. (2001). *Fiqh Siyâsah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Islam, T. P. E. (1994). *Ensiklopedi Islam V*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Labib, R. S. (2013). *Tafsir Ayat Pilihan*. Bogor: Al-Azhar Freshzone Publishing.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2011). *Al Qur'an dan Tafsirnya* (1st ed.). Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- M. Quraish Shihab. (2011). *Membumikan Al Qur'an*. Ciputat: Lentera Hati.
- Muhadi, Z., & Mustaqim, A. (2005). *Studi Kepemimpinan Spiritual*. Semarang: Putra Mediatama Press.
- Muthi'ah, A. (2017). Pemimpin Ideal dalam Perspektif Hadis. *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Quran Dan Al-Hadis*, 5(1), 75–92.
- Pulungan, J. S. (1994). *Fiqh Siyâsah*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Rafsanjani, H. (2017). Kepemimpinan Spiritual (Spiritual Leadership). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
- Sarnoto, A. Z. (2023a). Etika, Moral dan Akhlak. In *Pendidikan Agama Islam* (pp. 35–54). Padang : CV HEI PUBLISHING INDONESIA.
- Sarnoto, A. Z. (2023b). *Negara dan Pemerintahan dalam Islam*. Makasar : Mitra Ilmu.
- Sarnoto, A. Z. (2023c). *Sistematic Mapping Study: Metodologi, Analisis, dan Interpretasi* (1st ed.). Malang: Malang: Seribu Bintang.
- Sarnoto, A. Z., & Rahmawati, S. T. (2022). Quranic Perspective on Leadership in Educational Institutions. *The International Journal of Education Management and Sociology*, 1(1), 8–13. <https://doi.org/10.58818/ijems.v1i1.2>

- Sarnoto, A. Z., & Sholihin. (2017). Perilaku Kepemimpinan Berbasis Spiritual Dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam. *Statement | Jurnal Media Informasi Sosial Dan Pendidikan*, 7(2), 1–10.
- Shihab, M. Q. (2007). *ENSIKLOPEDIA AL-QUR,AN Kajian Kosakata*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2011). *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'ân, Vol.5*. Jakarta: Lentera Hati.
- Subhani, J. (1997). *al-Milal wa an-Nihal: Studi Tematis Madzhab Kalam, jil. 1*. Pekalongan: al-Hadi.
- Taimiyah, I. (n.d.-a). *al-Hisbah fi al-Islâm*. Dar al-Katibi al-'Arabi.
- Taimiyah, I. (n.d.-b). *as-Siyâsatu asy-Syar'iyah*. Mesir, Dar al-Kitab al-'Arabî.
- Zed, M. (2008). *Metodologi Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.